

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Latif dan Hasbi Ali,2010, *Politik hukum*, Jakarta : Sinar Grafik

Amran Suadi dan Mardi Candra,2016,*politik hukum*, Jakarta : Prenadamedia

Bambang Sunggono,1997,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT

Rajagrafindo Persada

C.S.T Kansil,1986,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,Jakarta :

Balai Pustaka

Feri Amsari,2011, *Perubahan UUD 1945*, Jakarta : Rajawali pers

Firmanzah,2018,*Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia

Ikhsan Rosyada,2006,*Mahkamah Konstitusi*,Jakarta : PT Rineka Cipta

Jimly Asshiddiqie,2006,*konstitusi dan konstiusionalisme indonesia*, Jakarta

Jimly Asshiddiqie,2010,*Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca*

reformasi, Jakarta: Sinar Grafika

Khairul Fahmi,2016,*Pemilihan umum dalam transaksi demokrasi*,Jakarta : PT

Raja Grafindo persada

Mahfud Md.,2010, *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada

Mahfud Md,2013,*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*

Konstitusi,Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Marida Farida,2007,*Ilmu Perundang-Undangan*,Yoqyakarta: Kanisius

_____, 2013,*Ilmu Perundang-undangan*,Cet ke 15Jakarta: Kanisius

Miriam Budiarto, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta : PT Gramedia pustaka
utama

Ni'matul huda, 2015, *hukum tata negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu
Kini dan ke Depan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas pemilu
legislatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta : Sinar
Grafika

Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:
Rineka Cipta

Saldi Isra, *Problematika hukum dan Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Soerjono Soekanto, 1984, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: UI-Press

Yuliani, *Asas pembentukan peraturan yang baik*, Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada

Zainuddin Alii, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD

(MD3)

Undang-undang no 11 tahun 2011 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang pemilihan

anggota DPR,DPRD, dan DPD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang kewajiban

verifikasi partai politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2018

C. Artikel, Skripsi, Makalah,Jurnal,Internet

Adhi Wicaksono,2014”*Kepercayaan pemilu bisa hilang*”,Republika,Jakarta,

pernyataan Hadar Nafis Gumay,

Kompas ,2018, “*Persaingan Partai Politik semakin ketat*”

Refly Harun dan Hadar N gumay, *Verifikasi faktual*. Jakarta: Media Indonesia

Wawan H Prabowo, “*Persaingan Partai Politik Makin Ketat*” Jakarta: Kompas

Caisa Aamuliadiga dkk ,2014, ” *Upaya negara dalam menciptakan keamanan*

hakim guna mencapai peradilan umum yang independen”, Padang :

Lomba karya tulis ilmiah Law Enforcement fair

Didi Nazmi,2016, ” *politik hukum* ” ,Padang: Kuliah politik hukum

Ferri Amsari, 2018, “ *Verifikasi Partai Politik*”, Padang: kuliah umum

Harun Husein,2017, ” *Sikap anggota KPU 2012-2017 Terhadap verifikasi partai*”, Jakarta : Republika

Harun Husein,2018, ” *Verifikasi Partai dan Unholly Alliance* ”, Jakarta : Republika

Hasil Rekapitulasi Verifikasi Partai Politik Provinsi Sumatera Barat, *Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat*, 11 Februari 2018

Refly Harun,2018” *Negosiasi partai politik dan KPU hindari verifikasi faktual*”, Jakarta : CNN liver

2018” *ini pilihan resiko paling kecil*” Jakarta : Republika

Suharizal,2018, “ *Pemilu dan Kepartaian*”, Padang : Slide bahan ajar pemilu dan kepartaian

Chusnul Mar’iyah, 2018, ” *Jurnal Ketatanegaraan pemilihan umum, partai politik dan demokrasi* ” : *antara tafsir konstitusi dan praktik politiik*”, Jakarta:

Lembaga Pengkajian MPR-RI

Pataniari Siahhan,2017, ” *Jurnal Ketatanegaraan dan Pemilihan Umum* ” Jakarta :

Lembaga Pengkajian MPR RI

Sekretariat Jendral MPR RI,2013, “ *empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara* ”, Jakarta,

Sumitra,2018, "*Konstitusionalitas ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019*" Padang : Proposal penelitian

Wawancara dengan Bapak Faisal Rahman, SE.,MH, *Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum dan HKI*, di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Selasa, 12 Maret 2019 Pukul 15.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Gebril Daulai, *Komisioner KPU Sumbar*, di Universitas Andalas pada hari Minggu 17 Februari 2018 pukul 18.55 WIB

Wawancara dengan Husaini Kadir, *pejabat Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan*, Di Padang Selatan Pada hari Senin 11 Maret 2019 Pukul 11.30 WIB

Wawancara dengan Vifner SH.,MH, *Komisioner Banwaslu Provinsi Sumatera Barat*, di Hotel Whiz Khatib Sulaiman pada hari Senin 25 Maret 2019 pukul 13.15 WIB

Valina Singka.2017. "*Partai Politik dan Pemilihan umum*". (Jakarta : Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR-RI)

Veri Junaidi,2018, "*Pelanggaran Administrasi*", Jakarta : Republika

Ahmad Manarul Hakim. "Sifat, fungsi, dan tujuan hukum". lihat :

<http://www.yuksinau.id/sifat-fungsi-dan-tujuan-hukum/#!> diakses pada 24

Februari 2019 pukul 06.55

Alfian Syafril. " ini partai politik peserta pemilu 2019".2018. lihat :

<https://netz.id/list/2018/02/17/00516-01016/1004170218/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019> diakses pada 28 Februari 2019 pukul 22.28

WIB

Banjarmasinpost.2017.”Giliran Rhoma Irama Gugat UU Pemilu Ke MK”. Lihat :

<https://www.google.com/amp/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2017/08/09/giliran-rhoma-irama-gugat-uu-pemilu-ke-MK-ternyata-ini-alasannya?espv=1> diakses pada 6 september 2018

Didik Supriyanto.”Verifikasi faktual. keledaipun tak mau terantuk batu yang sama”.Kompas.com.lihat :

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/21162751/verifikasi-faktual-parpol-keledai-pun-tak-mau-terantuk-batu-yang-sama>, diakses 15 Februari 2019 pukul 00.46 WIB

Erwin Dariyanto.”alur pembentukan sebuah undang-undang”. lihat :

<https://news.detik.com/berita/3882715/begini-alur-pembentukan-sebuah-undang-undang> diakses pada 30 januari 2019 pukul 15:09

Handoko.Teatrika. “KPU Lakukan Perubahan” lihat :

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/kpu-sampaikan-5-perubahan-pkpu-terkait-verifikasi-parpol-1/full> diakses pada 10 september 2018 pukul 9:42

Humas Setkab RI. inilah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

pemilihan umum (2). lihat : [setkab.go.id/inilah-undang-undang nomor 7 tahun 2017](http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017) diakses pada 21 februari 2018 pukul 10.42

Humas Setkab RI. “inilah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

pemilihan umum (1)”. lihat : [setkab.go.id/inilah-undang-undang nomor 7 tahun 2017](http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017) diakses pada 21 februari 2018 pukul 11.07

- Juan Dynash."Profil Partai Politik pemilu 2014". 2014. lihat
: <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/04/profil-lengkap-partai-politik-peserta.html> diakses pada 28 Februari 2019 pukul 22.27 WIB
- Komisi Pemilihan Umum, lihat : <https://infopemilu.kpu.go.id/> diakses pada 20 Maret 2019 pukul 7.43 WIB
- Malik."6 Asas pemilu".2017. lihat : <https://mengakujenius.com/asas-pemilu-luberjurdil/> diakses pada 25 Februari 2019 pukul 12.33
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.2017. lihat : <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf> diakses pada 24 Februari 2019 pukul 7.57 WIB
- Purnomo Sucipto, *Yang perlu diketahui pembuatan peraturan perundang-undangan*, Setkab Republik Indonesia, lihat : <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/,2015>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 9.21 WIB
- Toto Suryaningtyas. "Merunut Sejarah Konflik Partai Golkar". Kompas.2016. lihat : <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/14/06000021/Merunut.Sejarah.Konflik.Partai.Golkar?page=all> diakses pada 28 Februari 2019 pukul 22.40 WIB
- Tsarina Maharani."Rapat Komisi II-KPU Sepakat Revisi Aturan Verifikasi Parpol". lihat : <https://m.detik.com/news/berita/d-3822259/rapat-komisi-ii->

[kpu-sepakat-revisi-aturan-verifikasi-parpol](#), diakses pada 3 maret 2018
pukul 10.00 WIB

Zakky.”34 Nama Provinsi terbaru”. 2018.lihat :

<https://www.zonareferensi.com/provinsi-di-indonesia/> diakses pada 28
Februari 2019 pukul 14.03

“daftar partai politik”.lihat :

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia, diakses
pada 3 Februari 2019 pukul 22..00

